



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA
SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
SOP/UPM/DJBM-32**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 9

1. TUJUAN

Pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis dalam melaksanakan penetapan fungsi jalan sebagaimana amanat PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 61 ayat (1) yang dilakukan secara berkala dengan Keputusan Menteri (paling singkat 5 tahun) dalam rangka review Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer).

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- 3.3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, tentang RTRWN.
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- 3.10 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum
- 3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
- 3.12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 69 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional.
- 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 9

- 3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2011-2030.
- 3.16 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- 3.17 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.
- 3.18 Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional (RUJPJN).

4. DEFINISI

4.1. Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.2. Jalan Arteri Primer (JAP)

Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.3. Jalan Kolektor Primer (JKP)

Terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.4. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 9

4.5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN

Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011)

4.6. Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.7. Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.8. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

4.9. Pengaturan Jalan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.10. Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.11. Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.12. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 9

4.13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.14. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.15. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJPJJN

Dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012)

4.16. Sistem Jaringan Jalan

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006)

4.17. Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.18. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.19. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 9

5.1. Pasal 356

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan.

5.2. Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 356, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk
- Perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
- Pelaksanaan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
- Penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerjasama luar negeri;
- Penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional; dan
- Pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.

5.3. Pasal 358


Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan terdiri atas:

- Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
- Seksi Sistem Jaringan.

5.4. Pasal 359

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka panjang dan menengah serta rencana kerja tahunan, pelaksanaan pra studi kelayakan dan studi kelayakan jalan serta indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional.
- (2) Seksi Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional serta pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.

6. RINCIAN PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	ARSIP
		5 Hari	Resume bahan kebijakan nasional dan peraturan (RTRWN, konsep rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional, rencana induk kepariwisataan, pelabuhan nasional, kebandarudaraan nasional, dll)

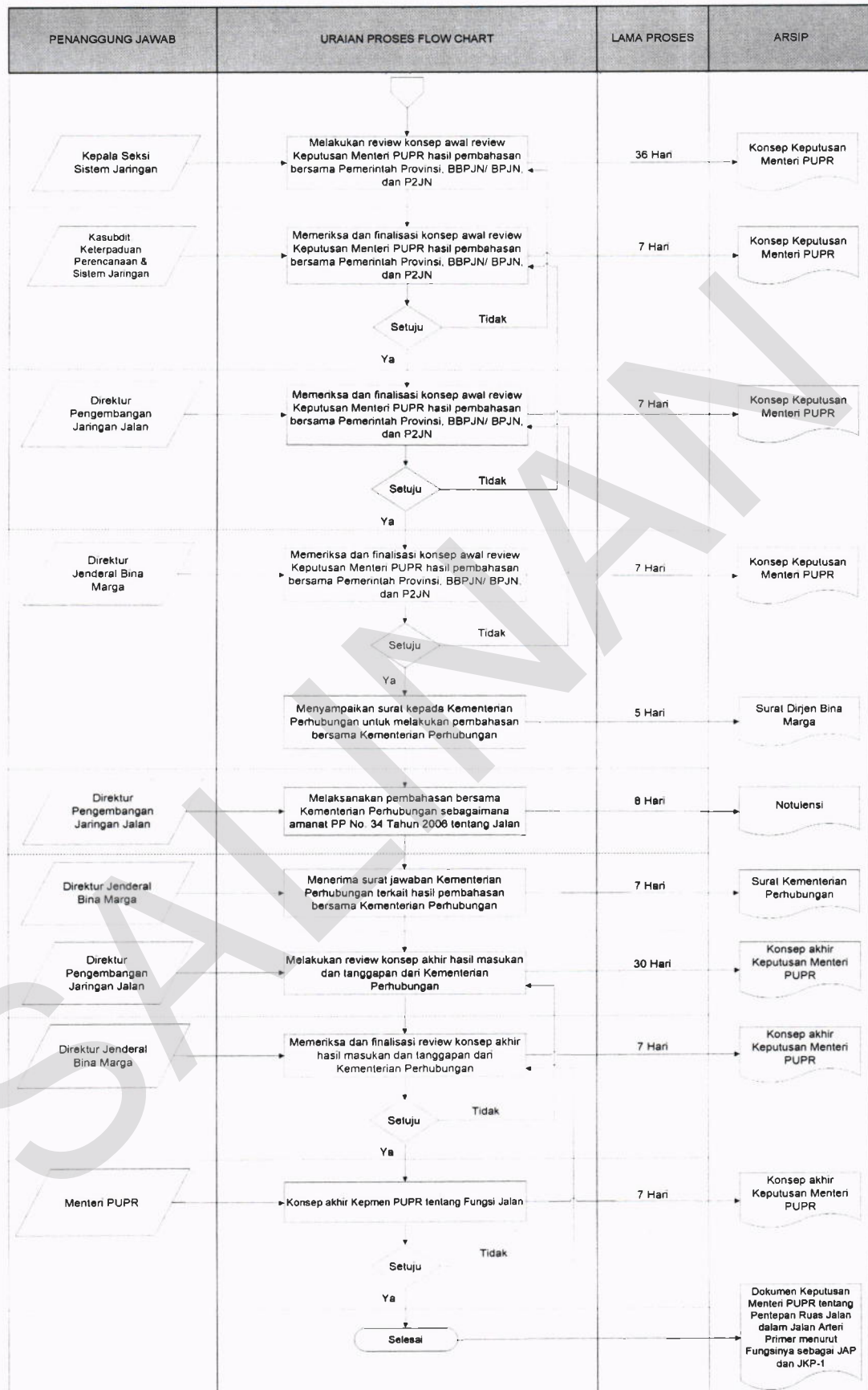
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 9

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	ARSIP
Kepala Seksi Sistem Jaringan	Menyiapkan bahan kriteria perubahan fungsi jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 Hari	Konsep awal kriteria perubahan fungsi jalan
Kasubdit Keterpaduan Perencanaan & Sistem Jaringan	Memeriksa dan finalisasi bahan kriteria perubahan fungsi jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 Hari	Konsep akhir kriteria perubahan fungsi jalan
Direktur Pengembangan Jaringan Jalan	Memeriksa dan finalisasi bahan kriteria perubahan fungsi jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 Hari	Kriteria perubahan fungsi jalan
	Menyampaikan kriteria perubahan fungsi jalan kepada Pemerintah Provinsi dan permohonan usulan peningkatan fungsi jalan sebagai bahan evaluasi review penetapan fungsi jalan	3 Hari	Surat Direktur Pengembangan Jaringan Jalan
	Menerima surat jawaban usulan daerah dari seluruh Pemerintah Provinsi	15 Hari	Surat jawaban usulan daerah dari Pemerintah Provinsi
Staf	Memetakan usulan daerah dari seluruh Pemerintah Provinsi	15 Hari	Kompilasi surat usulan daerah dari seluruh Pemerintah Provinsi
Kepala Seksi Sistem Jaringan	Melakukan koordinasi dengan P2JN Provinsi terkait informasi lapangan untuk ruas-ruas usulan Pemerintah Provinsi	30 Hari	Data-data terkait termasuk sketsa jaringan jalan
	Menganalisa usulan daerah dan seluruh Pemerintah Provinsi dan menyusun konsep awal review Keputusan Menteri PUPR tentang fungsi jalan	30 Hari	Konsep awal review Keputusan Menteri PUPR
Kasubdit Keterpaduan Perencanaan & Sistem Jaringan	Memeriksa dan finalisasi konsep awal review Keputusan Menteri PUPR tentang fungsi jalan sesuai kriteria perubahan fungsi jalan	7 Hari	Konsep awal review Keputusan Menteri PUPR
Direktur Pengembangan Jaringan Jalan	Memeriksa dan finalisasi konsep awal review Keputusan Menteri PUPR tentang fungsi jalan sesuai kriteria perubahan fungsi jalan, termasuk kebijakan yang berlaku	7 Hari	Konsep awal review Keputusan Menteri PUPR
	Membahas konsep awal review Keputusan Menteri PUPR bersama Pemerintah Provinsi, BBPJN/ BPJN, dan P2JN	21 Hari	Benita Acara Pembahasan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku : 01 April 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 7 dari 9



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 9

7. FORMULIR

7.1. Tahapan Penyusunan Konsep Surat Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Jalan



7.2. Kriteria Evaluasi Perubahan Fungsi Jalan

- Kesesuaian arahan tata ruang (perubahan peranan pelayanan suatu pusat kegiatan dan peningkatan wilayah penyelenggaraan jalan)
 - Jalan Arteri Primer (JAP)**
 - menghubungkan antara PKN-PKN, PKN-PKW, PKN/PKW-PU, PKN/PKW-PP, PKN/PKW-BU, PKN/PKW-BP
 - Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)**
 - menghubungkan antar Ibukota Provinsi
 - menghubungkan PKN/PKW-PKSN, PKN/PKW-KSN, PKSN-PKSN, termasuk akses ke **KSPN** berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (**Jalan Strategis Nasional/ JSN**)
- Hierarki outlet dalam sistem transportasi nasional (peningkatan status outlet dalam suatu sistem transportasi)
 - Pelabuhan Utama dan Pengumpul** berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2011-2030
 - Bandara Pengumpul Skala Primer, Sekunder, dan Tersier** berdasarkan Permen Perhubungan No. KP 69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional
 - Terminal kelas A** (terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lalu lintas batas negara) berdasarkan Kep. Dirjen. Perhubungan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 9

Darat No. SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia

- **ASDP** (pelabuhan penyeberangan antar propinsi dan antar negara) berdasarkan Permen Perhubungan No. KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2015
- **Terminal Peti Kemas/ dry port** (bagian dari kelengkapan pelabuhan utama)

c. Perubahan fungsi jalan (pengurangan peran dan/ atau wilayah layanan)

- **Pembangunan jalan lingkar** sebagai pengganti jalan nasional eksisting

Ket:

PKN : Pusat Kegiatan Nasional

PKW : Pusat Kegiatan Wilayah

PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional

KSN : Kawasan Strategis Nasional

KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

PU : Pelabuhan Utama

PP : Pelabuhan Pengumpul

BU : Bandar Udara Utama (Pengumpul Skala Primer)

BP : Bandar Udara Pengumpul (Pengumpul Skala Sekunder & Tersier)

7.3. Ruas Jalan yang Berubah Fungsinya menjadi JAP dan JKP-1 (Ruas Jalan Daerah menjadi Jalan Nasional)

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Fungsi Jalan	Asal Status Jalan			Perubahan Fungsi Jalan Menjadi			Perubahan Status Jalan Menjadi	Justifikasi
				Pro vinsi	Kabup aten	Kota	J A P	JKP-1 (non JSN)	JKP-1 (JSN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Nasional	
										Nasional	

Ket:

⁴ isi dengan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), atau Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)

^{5,6,7,8,9,10} diisi dengan panjang (km)

7.4. Ruas Jalan yang Berubah Fungsinya dari JAP dan JKP-1 (Ruas Jalan Nasional menjadi Jalan Daerah)

No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)	Asal Status Jalan	Asal Fungsi Jalan			Perubahan Fungsi Jalan Menjadi	Perubahan Status Jalan Menjadi			Justifikasi
				J A P	JKP-1 (non JSN)	JKP-1 (JSN)		Provin si	Kabup aten	Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nasional								
			Nasional								

Ket:

⁸ isi dengan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), atau Jalan Lingkungan Sekunder (Jling-S)

^{5,6,7,9,10,11} diisi dengan panjang (km)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat